

JURNAL

Kota Tual merupakan salah satu dari banyak daerah yang di mekarkan paska orde baru. Sejak di undangkanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, Kota Tual resmi menjalankan pemerintahanya secara mandiri melalui pejabat defenitif, dengan empat kecamatan dan kemudian dimekarkan satu kecamatan baru, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Dullah Utara
2. Kecamatan Dullah Selatan
3. Kecamatan Pulau Tayando Tam
4. Kecamatan Pulau-Pulau Kur
5. Kecamatan Kur Selatan

Wilayah yang sebelumnya tergabung dalam pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara resmi memiliki pemimpin daerah melalui pilkada langsung pada tahun 2009 untuk pertama kalinya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru (Kota Tual) sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat¹ sekaligus sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwasanya adanya pembentukan daerah otonom baru diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

¹ Penjelasan Umum. UU Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tujuan tersebut perlu kiranya adanya Evaluasi secara ilmiah terhadap jalannya pemerintahan Kota Tual sebagai daerah otonom baru pada periode 2009-2014 berdasarkan hasil kerja ataupun laporan pertanggung jawaban pemerintah.

Selanjutnya, kinerja pemerintah Kota Tual pada tahun 2009-2014 tentu mengalami kelebihan dan kekurang, terutama permasalahan pendidikan. Pendidikan tentu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pola pikir masyarakat dengan tujuan menaikkan taraf hidupnya. Pentingnya pendidikan dapat dibuktikan melalui besarnya pembiayaan sektor pendidikan secara nasional paling sedikit atau sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara² karena pendidikan di anggap dapat memberikan pembekalan kepada setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan sejaterah, itu sebabnya issue pendidikan menjadi pilihan dasar adanya pemekaran Kota Tual sebagai daerah otonom baru.

Sektor pendidikan, pemerintah Kota Tual belum mampu memberikan pelayanan secara baik hal ini dapat terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat Kota Tual yang relative rendah baik sebelum maupun sesudah adanya pemekaran wilayah, di ketahui pada tahun 2013 masih terdapat 14,45% penduduk 10 tahun keatas yang tidak tamat SD sama sekali, sementara yang menempuh pendidikan D1-S3 hanya berkisar pada 9,16%, sementara persentase menurut status sekolah

² UUD 1945. Pasal 31 ayat 4

adalah sebesar 69,91% penduduk Kota Tual tidak bersekolah lagi, masing-masing menurut jenis kelamin : dari laki-laki sebanyak 70,95% dan perempuan 68,83% dari total penduduk 89.025 jiwa.³. Dari tingkat pendidikan yang relative rendah tersebut masyarakat Kota Tual belum mampu memahami secara baik bagaimana alur politik dan pemerintahan yang di peragakan selama pemerintahan berlangsung, sehingga mereka memahaminya sebagai sebuah kewajiban yang harus di tempuh setiap masyarakat, pada akhirnya konflik di masyarakat pun tidak terelakkan akibat dari penganguran yang tinggi dan tingkat pendidikan yang relative rendah. Belum lagi diperkeruh dengan suasana klaim-klaim tokoh pemekaran sehingga menghambat adanya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pelayanan umum termasuk sektor pendidikan yang semakin melemah. Disisi lain pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas berupa perpustakaan sekolah secara merata maupun perpustakaan daerah sebagai penunjang pertumbuhan pendidikan adapun sekolah yang sudah memiliki perpustakaan tidak dapat berjalan secara maksimal sebab tidak adanya tenaga pustakawan untuk mengelolanya secara baik⁴, serta tidak terlaksananya pembangunan ruang praktikum dan laboratorium di tambah lagi dengan fasilitas pendukung seperti buku atau bahan referensi lainnya yang sangat minim⁵ hal tersebut diyakini sebagai penghambat tumbuhnya tingkat pendidikan di masyarakat Kota Tual.

³ SUMBER. Inkesra Kota Tual tahun 2013

⁴ <http://www.tribun-maluku.com/2014/03/diknas-kota-tual-gencar-bangun.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 01.40 WIB

⁵ LKPJ Pemerintahan Kota Tual Tahun 2014

Belum lagi pemberdayaan masyarakat yang tidak efektif pada pemerintahan Kota Tual yang kemudian berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Kota Tual di kutip dari **AMBON Tribun-Maluku.Com** pada perhitungan Statistik tahun 2014 lalu sebesar 32,9 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Tual yang tersebar di 5 Kecamatan yang ada di Kota Tual, sedangkan pengangguran terbuka sebesar 11,2 persen⁶. Secara gamblang dapat diartikan bahwa meningkatnya angka pengangguran tentu sejalan dengan minimnya kualitas sumber daya manusia, yang artinya melemahnya sektor pendidikan juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat termasuk didalamnya permasalahan pengangguran.

Padahal sejatinya apabila kita lihat secara yuridis bahwa terbentuknya daerah otonom baru mempunyai harapan besar untuk mensejahterakan masyarakatnya bukan malah menggunakan otoritas dan dukungan masyarakat sebagai lahan konflik politik yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Maka dari itu dipandang perlu dalam memahami bagaimana proses berjalanya pemerintahan Kota Tual sebagai daerah otonom baru dan kemudian melakukan evaluasi kinerja khususnya pada sektor pendidikan pemerintah Kota Tual, sebab pendidikan adalah unsur penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pendidikan sebagai modal awal anak untuk berkreatifitas dalam rangka memperoleh kehidupan yang layak atau sejahtera. Maka dari itu dipandang perlu dalam memahami bagaimana proses berjalanya pemerintahan Kota Tual sebagai daerah otonom baru dan kemudian

⁶ <http://www.tribun-maluku.com/2015/02/tingkat-pengangguran-di-kota-tual-329.html>. Diakses pada 16 Desember 2015 pukul 03.15

melakukan evaluasi dari sector pendidikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berangkat dari segala bentuk permasalahan diatas penulis berupaya menelaah dan melakukan evaluasi terhadap jalanya kinerja pemerintahan Kota Tual selama periode 2009-2014 agar kiranya mampu memberikan tawaran, guna meningkatkan kesejaterahan masyarakat melalui hak otonomi terutama permasalahan pendidikan. Sebab sudah menjadi tanggung jawab pemerintah agar mensejaterahkan masyarakat yang dirumuskan dalam tugas wajib pemerintah daerah melalui asas otonomi daerah.

Penulis berupaya mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Kota Tual menggunakan pisau analisis Gibson dalam Mangkunegara (2005) indicator evaluasi kinerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Produktifitas

Produktifitas adalah kesempurnaan atau ketepatan daripada kebijakan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan daripada kebijakan atau program yang di buat sekaligus memiliki standar penilaian sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Yang diukur berdasarkan:

- a. Tenaga Pendidik (Guru)
- b. Infrastruktur dan Pengadaan Alat Tulis
- c. Tingkat Melek Huruf dan Partisipasi Pendidikan
- d. Angka Putus Sekolah

2. Efektif dan Efisien

Dalam merealisasikan program-program suatu organisasi tepat pada sasaran yang di tuju dan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang diukur berdasarkan:

- a. Tenaga Pendidik (Guru)
- b. Infrastruktur dan Pengadaan Alat Tulis
- c. Tingkat Melek Huruf dan Partisipasi Pendidikan
- d. Angka Putus Sekolah

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan adalah dapat dilihat dari tingkat kepuasan penerima pelayanan, dalam hal ini adalah masyarakat umum. Kualitas pelayanan sendiri dapat di ukur berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah.

- a. Tenaga Pendidik (Guru)
- b. Infrastruktur dan Pengadaan Alat Tulis
- c. Tingkat Melek Huruf dan Partisipasi Pendidikan
- d. Angka Putus Sekolah

Untuk menuai hasil penelitian yang matang penulis menggunakan metode penelitian ilmiah yang berdasar kepada analisa kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan wawancara, dokumentasi serta observasi yang tertuju pada Kota Tual itu sendiri.

Berdasarkan pada rumusan masalah peneltian yakni Bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Tual Prvinsi Maluku Sebagai Daerah Otonom Baru Bidang Pendidikan Tahun 2009-2014. Yang dianalisa dengan konsep teoritis Gibson yang

digunakan untuk mengukur tiga katagori yaitu, Produktifitas, Efektif dan Efisien serta Kualitas Pelayanan yang mencakup:

1. Tenaga Pendidik (Guru)

Secara teoritis dan berdasarkan temuan lapangan bahwa berkaitan dengan upaya peningkatan Tenaga Pendidik (Guru) Pemerintah Kota Tual telah berhasil serta produktif dalam menjalankan tugasnya Adapun yang menjadi catatan penting adalah terkait Usulan Kenaikan Pangkat yang tidak terjadi kevalidan data sesuai perencanaan. Sementara untuk kegiatan lainnya telah dijalankan secara baik. Yang artinya mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu pemerintah Kota Tual berhasil melakukan pendidikan dan pelatihan yang sarasanya adalah seluruh Guru, baik Guru tetap, honorarium maupun Guru Kontrak guna memberikan modal pengetahuan dalam memberikan pengajaran kepada anak didiknya. Meski disisi lain harus diakui bahwa dalam kinerja tenaga pendidik belum sesuai dengan harapan terutama didaerah terpencil. Dengan kata lain dalam praktek belajar-mengajar tenaga pendidik belum sesuai seperti harapan Pemerintah dan masyarakat secara umum.

2. Infrastruktur dan Pengadaan Alat Tulis

Dengan adanya Pemekaran Kota Tual sebagai daerah otonom baru mampu membawa perubahan yang signifikan dari sebelum adanya pemekaran, kongkritnya, jumlah sekolah semakin bertambah terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau serta infrastruktur sudah mulai terjadi perubahan baik dari segi fisik gedung sampai pada meja-kursi belajar serta bantuan alat tulis-menulis. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Tual Produktif

dalam kinerja peningkatan infrastruktur pendidikan Serta mampu memanfaatkan anggaran yang ada sesuai perencanaan. Hal tersebut sekaligus menandakan bahwasanya infrastruktur dan peralatan tulis-menulis yang diadakan pemerintah Kota Tual sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menghadirkan kualitas pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya. Namun permasalahan efektivitas waktu karena terkendala kondisi geografis wilayah pemerintah belum mampu sepenuhnya menjalankan program dan kegiatannya sesuai perencanaan waktu yang ditentukan. Terkait anggaran sebagai akibat dari perencanaan yang kurang matang manuai pembengkakan anggaran yang signifikan

3. Tingkat Melek Huruf dan Partisipasi Pendidikan

Pemerintah Kota Tual sesuai temuan lapangan mampu menjawab permasalahan masyarakat Kota Tual meski belum sempurna seperti daerah lainnya, namun sudah meningkatkan taraf pendidikan bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat sebelum adanya pemekaran. Dimana Pemerintah Kota Tual mampu meningkatkan angka melek huruf masyarakat Kota Tual mencapai 99,70% pada tahun 2013-2014 sekaligus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan mencapai 69,91% hingga tahun 2013 jika dibandingkan dari sebelum adanya pemekaran yang hanya berkisar 52,11%. Artinya dengan adanya Pemekaran Kota Tual telah berhasil memperbaiki kondisi pendidikan di Kota Tual sekali-lagi apabila dibandingkan dengan situasi sebelum adanya pemekaran maka dapat disimpulkan pemerintah telah produktif dari segi kebijakan, efisien secara

anggaran yang kemudian berpengaruh pada kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah setidaknya menjadi hal serius yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat hingga tahun 2013 angka putus sekolah masih berada pada kisaran 69,91% penduduk Kota Tual tidak bersekolah lagi. Jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin 68.83% penduduk laki-laki tidak bersekolah lagi dan penduduk perempuan sebesar 70.95%. sehingga dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan melalui program dan kegiatan belum tersampaikan secara baik, walaupun telah dilakukan belum sesuai harapan masyarakat. Meski disisi lain harus diakui bahwa tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan masyarakat Kota Tual mulai meningkat namun masyarakat yang telah putus sekolah sejak sebelum adanya pemekaran masih tetap berada dalam katagori putus sekolah, maka dari itu perlu stimulus lebih serta rekayasa kebijakan yang mampu menghidupkan kembali semangat pendidikan bagi mereka.

Secara keseluruhan dari upaya peningkatan Tenaga Pendidik (Guru), peningkatan Infrastruktur Pendidikan dan Pengadaan alat tulis serta peningkatan angka Melek Huruf dan Partisipasi pendidikan ditambah dengan angka putus sekolah, pemerintah telah menjalankan secara produktif yang tentunya bermanfaat secara berkala, program dan kegiatan dijalankan dapat dikatakan berkecukupan secara anggaran, sehingga mampu menghasilkan kualitas pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat, meski yang menjadi catatan adalah bahwa tidak efektif dari segi waktu serta pengaplikasian tenaga pendidik

terkadang jauh dari harapan terutama praktek belajar mengajar di daerah terpencil yang seringkali ditingal oleh para guru karena alasan tempat tinggal serta telekomunikasi sebagai akibat dari kondisi geografis wilayah, yang sekaligus berakibat pada meningkatnya angka putus sekolah.

Berangkat dari segala permasalahan yang terjadi penulis menuai saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembagian fokus pendidikan antara pendidikan non formal, pendidikan dasar serta pendidikan perguruan tinggi. Yang kemudian dibakukan dalam bentuk SKPD agar fokus sosialisasi dapat tercapai.
2. Sebaiknya untuk permasalahan pemuda dan olahraga digabungkan dalam Dinas Kebudayaan bukan Dinas Pendidikan. Agar Dinas Pendidikan lebih fokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebab Pendidikan merupakan isu sentral adanya pemekaran Kota Tual sebagai daerah otonom baru
3. Perlu adanya pengadaan transportasi laut milik pemerintah guna menunjang aktifitas antar Kecamatan sebab wilayah Kota Tual merupakan daerah kepulauan.
4. Perlu diadakanya pembangunan rumah Dinas bagi para guru ataupun kepala sekolah terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Tayando-Tam, Kecamatan P.P Kur dan Kecamatan Kur Selatan. Agar tenaga pendidik tidak meninggalkan lokasi sekolah dalam waktu yang lama karena alasan tempat tinggal.
5. Perlu adanya telephone satelit untuk sekolah-sekolah didaerah pedalaman yang belum dijamah oleh sinyal seluler.

6. Sebaiknya dalam melakukan perencanaan terlebih dahulu dilakukan penelitian atau survey untuk menghindari kesalahan antara kebijakan dan kebutuhan, serta tidak terjadinya pembengkakan anggaran.